

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

BAB I

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan selalu diawali dengan proses perencanaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD.

Berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;

- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- E. Catatan atas Laporan keuangan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan dari suatu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi.
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal.
- b. Surplus / Defisit-LO pada periode bersangkutan.
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - 2. Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d. Informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan program dan kegiatan;
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
- h. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 35);
- k. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 / I / Tahun 2020 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2486 / XI / Tahun 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III : Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1.1 Pendapatan pada LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan pada LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul sehubungan dengan Penerapan berbasis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Berbasis Kas, untuk Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan yang Berbasis AkruaI

BAB IV : Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

BAB V : Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur penyajian Capaian Kinerja pada Laporan Realisasi Program dan Kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan Anggaran sebesar **Rp 44.653.050.060,00,-** sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 dapat terealisasi sebesar **Rp 43.964.272.865,00,-** atau sebesar **98,46%** terdapat Sisa Anggaran sebesar **Rp 688.777.195,00,-** dengan Capaian Kinerja **99,72%**.

Capaian Kinerja pada Laporan Realisasi Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI	
					KEU	FISIK
1	2	3	4	(4-3)=5	6	7
A.	PENDAPATAN	23.400.000,00	23.477.500,00	77.500,00	100,33	100
1.	Pendapatan Asli Daerah	23.400.000,00	23.477.500,00	77.500,00	100,33	100
1.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	100
1.2	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	100
<i>Adanya Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 77.500,00,-</i>						
B.	BELANJA DAERAH	44.653.050.060,00	43.964.272.865,00	(688.777.195,00)	98,46	99,72
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.250.851.760,00	41.642.770.156,00	(608.081.604,00)	98,56	99,83
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	303.007.800,00	285.391.943,00	(17.615.857,00)	94,19	99,17
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 285.391.943				
	Keluaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu				
	Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kota Makassar				
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	236.829.900,00	230.634.096,00	(6.195.804,00)	97,38	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.514.000,00	6.054.000,00	(3.460.000,00)	63,63	100,00
<i>Adanya Makanan dan Minuman Rapat serta Perjalanan Dinas Dalam Kota yang Tidak Dilaksanakan sebesar Rp. 3.460.000,- yang Terdiri dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 2.160.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 1.300.000,-</i>						
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.297.250,00	23.478.197,00	(3.819.053,00)	86,01	100,00
<i>Adanya Perjalanan Dinas Biasa yang Tidak Dilaksanakan sebesar Rp. 3.819.053,-</i>						
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.739.500,00	3.059.500,00	(2.680.000,00)	53,31	56,31
<i>Adanya Makanan dan Minuman Rapat serta Perjalanan Dinas Dalam Kota yang Tidak Dilaksanakan sebesar Rp. 2.680.000,- yang Terdiri dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 2.160.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 520.000,-</i>						
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.264.900,00	7.484.900,00	(780.000,00)	90,56	100,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.801.500,00	6.151.500,00	(650.000,00)	90,44	100,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.560.750,00	8.529.750,00	(31.000,00)	99,64	100,00

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.303.107.206,00	20.036.009.805,00	(267.097.401,00)	98,68	99,92
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 20.036.009.805				
	Keluaran	Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu				
	Hasil	Tersedianya Laporan Keuangan Tepat Waktu				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kota Makassar				
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.236.324.706,00	19.986.391.857,00	(249.932.849,00)	98,76	100,00
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.264.300,00	5.264.300,00	0,00	100,00	100,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.071.500,00	21.911.948,00	(17.159.552,00)	56,08	56,10
<i>Adanya Perjalanan Dinas Biasa yang Tidak Dilaksanakan sebesar Rp. 17.159.552,- karena Tidak Terdapat Kegiatan yang menyangkut Sub Bagian Keuangan di Akhir Tahun</i>						
1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.469.500,00	3.469.500,00	0,00	100,00	100,00
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	18.977.200,00	18.972.200,00	(5.000,00)	99,97	100,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.914.000,00	5.794.000,00	(120.000,00)	97,97	100
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 5.794.000				
	Keluaran	Dokumen Administrasi Milik Daerah				
	Hasil	Tersedianya Dokumen Administrasi Milik Daerah				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kota Makassar				
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.234.500,00	1.234.500,00	0,00	100,00	100
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.679.500,00	4.559.500,00	(120.000,00)	97,44	100
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.394.000,00	144.925.490,00	(468.510,00)	99,68	100
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 144.925.490				
	Keluaran	Rata-rata Penilaian Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kianerja ASN				
	Hasil	Terlaksananya Penilaian Kinerja ASN				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kota Makassar				
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.420.000,00	112.064.490,00	(355.510,00)	99,68	100
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.974.000,00	32.861.000,00	(113.000,00)	99,66	100
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.240.100,00	377.647.389,00	(21.592.711,00)	94,59	94,40
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 377.647.389				
	Keluaran	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor				
	Hasil	Tersedianya Dokumen dan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kota Makassar				
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.242.000,00	2.242.000,00	0,00	100,00	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.700.000,00	6.486.400,00	(213.600,00)	96,81	100
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.825.000,00	10.650.000,00	(175.000,00)	98,38	99,90
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.970.000,00	18.170.000,00	(1.800.000,00)	90,99	95,86
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.864.000,00	10.504.000,00	(360.000,00)	96,69	97,06
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.087.600,00	324.173.489,00	(18.914.111,00)	94,49	96,18
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.551.500,00	5.421.500,00	(130.000,00)	97,66	98,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.882.500,00	233.847.836,00	(1.034.664,00)	99,56	100
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 233.847.836				
	Keluaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Hasil	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kota Makassar				
1.6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.737.646,00	(262.354,00)	99,48	100
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.882.500,00	184.110.190,00	(772.310,00)	99,58	100

1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.484.894.154,00	20.222.733.663,00	(262.160.491,00)	98,72	100
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 20.222.733.663				
	Keluaran	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kota Makassar				
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.772.000,00	12.196.627,00	(5.575.373,00)	68,63	100
	<i>Secara umum, kegiatan sudah terlaksana 100% namun, khusus untuk Biaya Telepon rata-rata pembayaran setiap bulannya kurang dari Rp. 50.000,- sedangkan anggaran yang ada melebihi dari jumlah pemakaian yaitu Rp. 778.577,- dan pembayaran Biaya Tagihan Telepon untuk satu tahun sebesar Rp. 421.423,-. Untuk Biaya Berlangganan Internet setiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- dan dua bulan terakhir mencapai kurang lebih Rp. 1.600.000,- karena adanya penambahan kapasitas sedangkan anggaran yang ada melebihi dari jumlah pemakaian.</i>					
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.467.122.154,00	20.210.537.036,00	(256.585.118,00)	98,75	100
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.412.000,00	336.420.030,00	(37.991.970,00)	89,85	90,07
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 336.420.030				
	Keluaran	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik				
	Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi	Kota Makassar				
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.228.000,00	229.145.710,00	(32.082.290,00)	87,72	88,10
	<i>Adanya Belanja Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 28.091.400,- yang tidak digunakan karena terdapat beberapa Jabatan Struktural yang beralih ke Jabatan Fungsional dan untuk Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan terdapat kelebihan penganggaran</i>					
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.204.000,00	81.384.320,00	(5.819.680,00)	93,33	93,00
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.980.000,00	25.890.000,00	(90.000,00)	99,65	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN KEJENTERAMAN DAN KEJERTIBAN UMUM	2.190.111.800,00	2.122.076.068,00	(68.035.732,00)	96,89	97,74
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.939.004.100,00	1.932.535.768,00	(6.468.332,00)	99,67	100
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 1.932.535.768				
	Keluaran	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum)				
	Hasil	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum)				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kota Makassar				
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	539.658.400,00	537.365.400,00	(2.293.000,00)	99,58	100
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.191.995.500,00	1.190.879.368,00	(1.116.132,00)	99,91	100
2.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	48.966.700,00	45.919.500,00	(3.047.200,00)	93,78	100
2.1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	158.383.500,00	158.371.500,00	(12.000,00)	99,99	100

2.2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	237.807.700,00	176.640.300,00	(61.167.400,00)	74,28	79,17
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 176.640.300				
	Keluaran	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA				
	Hasil	Meningkatnya Penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kota Makassar				
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	71.755.600,00	65.742.550,00	(6.013.050,00)	91,62	100
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100.000.000,00	94.997.650,00	(5.002.350,00)	95,00	100
2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	66.052.100,00	15.900.100,00	(50.152.000,00)	24,07	25,02
<i>Adanya Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 36.103.700,- yang tidak dilaksanakan serta terdapat Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10.000.000,- yang menjadi SILPA</i>						
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	13.300.000,00	12.900.000,00	(400.000,00)	96,99	100
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 12.900.000				
	Keluaran	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA				
	Hasil	Meningkatnya Penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kota Makassar				
2.3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	13.300.000,00	12.900.000,00	(400.000,00)	96,99	100
3.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	150.315.700,00	144.023.741,00	(6.291.959,00)	95,81	100
3.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	16.454.000,00	16.454.000,00	0,00	100,00	100
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 144.023.741				
	Keluaran	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana				
	Hasil	Tersedianya Informasi Rawan Bencana				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kota Makassar				
3.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	16.454.000,00	16.454.000,00	0,00	100,00	100
3.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	82.188.600,00	77.096.641,00	(5.091.959,00)	93,80	100
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 16.454.000				
	Keluaran	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana				
	Hasil	Tersedianya Informasi Rawan Bencana				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kota Makassar				
3.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	82.188.600,00	77.096.641,00	(5.091.959,00)	93,80	100
3.3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	51.673.100,00	50.473.100,00	(1.200.000,00)	97,68	100
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 50.473.100				
	Keluaran	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
	Hasil	Terlaksanannya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kota Makassar				
3.2.1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	51.673.100,00	50.473.100,00	(1.200.000,00)	97,68	100

4.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	61.770.800,00	55.402.900,00	(6.367.900,00)	89,69	92,90
4.1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	60.225.050,00	55.402.900,00	(4.822.150,00)	91,99	95,29
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 55.402.900				
	Keluaran	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				
	Hasil	Terlaksanannya Data Lokasi Rawan Bencana Kebakaran				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kota Makassar				
4.1.1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	11.998.900,00	11.550.900,00	(448.000,00)	96,27	100
4.1.2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	45.389.250,00	43.852.000,00	(1.537.250,00)	96,61	100
4.1.3	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.422.900,00	0,00	(1.422.900,00)	0,00	0
<i>Kegiatan tidak dilaksanakan karena di Rasionalisasi</i>						
4.1.4	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.414.000,00	0,00	(1.414.000,00)	0,00	0
<i>Kegiatan tidak dilaksanakan karena di Rasionalisasi</i>						
4.2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.545.750,00	0,00	(1.545.750,00)	0,00	0
	Masukan	Dana yang terealisasi /digunakan sebesar Rp. 0				
	Keluaran	Cakupan Bencana Kebakaran				
	Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran				
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kota Makassar				
4.2.1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.545.750,00	0,00	(1.545.750,00)	0,00	0
<i>Kegiatan tidak dilaksanakan karena di Rasionalisasi</i>						

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yang bersifat dapat dikendalikan antara lain :

1. Kecenderungan perencanaan hanya berfokus pada pencapaian tujuan tanpa memperhitungkan pendukung pelaksanaannya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana, Efisiensi, dan Efektivitas pelaksanaannya;
2. Kurangnya kualitas dan kompetensi aparatur;
3. Terbatasnya dukungan anggaran, baik untuk operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan maupun penyelenggaraan kegiatan;
4. Masih terdapat kekurangan Pegawai di masing-masing sektor yang tersebar pada SKPD Lingkup Pemprov.Sulsel, sementara formasi yang ditetapkan dari pusat tidak sesuai dengan usulan formasi yang diusulkan;
5. Masih kurangnya prasarana yang menunjang penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Terjadinya peningkatan usulan mutasi ASN dari Kab/Kota dan Provinsi lain ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena adanya TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1 PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2022		TAHUN 2021
ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
23.400.000,00	23.477.500,00	-

Pada Tahun 2022 terdapat Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) berupa Sewa Asrama Pegawai yang terletak di Jalan Bontomanai dan Jalan Bontonampo Kota Makassar. Sampai akhir Tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar **Rp. 23.477.500,00,-** lebih besar dari Target Pendapatan sebesar **Rp. 23.400.000,00,-** disebabkan adanya Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar **Rp. 77.500,00,-**.

3.1.2 BELANJA

TAHUN 2022		TAHUN 2021
ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
44.653.050.060,00	43.964.272.865,00	42.518.117.047,00

Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Daerah direncanakan sebesar **Rp. 44.653.050.060,00** sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar **Rp. 43.964.272.865,00** atau **98,46%** yang berarti terdapat Sisa Anggaran sebesar **Rp. 688.777.195,00**. Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

NO	URAIAN	TAHUN 2022		%	TAHUN 2021
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	BELANJA OPERASI	44.408.167.560,00	43.730.425.029,00	98,47%	41.920.739.047,00
2	BELANJA MODAL	234.882.500,00	233.847.836,00	99,56%	597.378.000
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
JUMLAH		44.653.050.060,00	43.964.272.865,00	98,46%	42.518.117.047,00

A. BELANJA OPERASI

TAHUN 2022		TAHUN 2021
ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
44.408.167.560,00	43.730.425.029,00	41.920.739.047,00

Belanja Operasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel T.A. 2022 sebesar **Rp. 44.408.167.560,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 43.730.425.029,00** atau **98,47%** terdapat Sisa Anggaran sebesar **Rp. 677.742.531,00**.

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel T.A. 2022 sebesar **Rp. 20.236.324.706,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 19.986.391.857,00** atau **98,76%** terdapat Sisa Anggaran sebesar **Rp. 249.932.849,00**.

TAHUN 2022		TAHUN 2021
ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
20.236.324.706,00	19.986.391.857,00	20.486.801.973,00

2. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel T.A. 2022 sebesar **Rp. 20.236.324.706,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 19.986.391.857,00** atau **98,76%** terdapat Sisa Anggaran sebesar **Rp. 249.932.849,00**.

TAHUN 2022		TAHUN 2021
ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
20.236.324.706,00	19.986.391.857,00	20.486.801.973,00

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2022		%	TAHUN 2021
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	9.778.966.285,00	9.619.967.254,00	98,37%	9.211.766.507,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	10.457.358.421,00	10.366.424.603,00	99,13%	11.275.035.466,00
JUMLAH		20.236.324.706,00	19.986.391.857,00	98,76%	20.486.801.973,00

3. Belanja Barang dan Jasa

TAHUN 2022		TAHUN 2021
ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
24.171.842.854,00	23.744.033.172,00	21.433.937.074,00

Belanja Barang dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel sebesar **Rp. 24.171.842.854,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 23.744.033.172,00** atau **98,23%** terdapat Sisa Anggaran sebesar **Rp. 427.809.682,00**. Rincian Realisasi Barang dan Jasa sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.317.902.100,00	2.259.013.688,00	58.888.412,00
3	Belanja Jasa Kantor	20.299.185.976,00	20.026.473.099,00	272.712.877,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	696.378.178,00	689.897.264,00	6.480.914,00
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.980.000,00	25.890.000,00	90.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	832.396.600,00	742.759.121,00	89.637.479,00
JUMLAH		24.171.842.854,00	23.744.033.172,00	427.809.682,00

a. Belanja Barang Pakai Habis

TAHUN 2022	TAHUN 2021
2.259.013.688,00	2.385.090.482,00

Belanja Barang Pakai Habis merupakan Nilai Belana Barang Pakai Habis pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.259.013.688,00** yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	258.917.700,00	227.342.418,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.655.000,00	4.441.400,00
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	110.000.000,00	108.138.880,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	96.054.500,00	89.835.600,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	71.191.400,00	63.927.400,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.200.000,00	4.200.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.012.500,00	2.012.500,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.045.000,00	2.045.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.242.000,00	2.242.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	386.444.000,00	376.940.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.664.000,00	12.304.000,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.255.056.000,00	1.253.520.000,00
13	Belanja Pakaian KORPRI	112.420.000,00	112.064.490,00
TOTAL		2.317.902.100,00	2.259.013.688,00

b. Belanja Jasa Kantor

TAHUN 2022	TAHUN 2021
20.026.473.099,00	18.091.879.646,00

Belanja Jasa Kantor merupakan Nilai Belana Jasa Kantor pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 20.026.473.099,00** yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56.700.000,00	46.700.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	19.549.284.300,00	19.299.180.096,00
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	104.000.000,00	104.000.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	104.473.908,00	104.473.908,00
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	360.000.000,00	360.000.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Supir	56.985.768,00	56.985.768,00
7	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	421.423,00
8	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.970.000,00	18.170.000,00
9	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.572.000,00	11.775.204,00
10	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.000.000,00	24.766.700,00
TOTAL		20.299.185.976,00	20.026.473.099,00

c. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

TAHUN 2022	TAHUN 2021
689.897.264,00	-

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi merupakan Nilai Belana Iuran Jaminan/Asuransi pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 689.897.264,00** yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	634.080.178,00	628.412.864,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	27.720.000,00	27.326.400,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	34.578.000,00	34.158.000,00
TOTAL		696.378.178,00	689.897.264,00

d. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

TAHUN 2022	TAHUN 2021
25.890.000,00	37.000.657,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin merupakan Nilai Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 25.890.000,00** yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.900.000,00	6.850.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.680.000,00	7.670.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.400.000,00	11.370.000,00
TOTAL		25.980.000,00	25.890.000,00

e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

TAHUN 2022	TAHUN 2021
742.759.121,00	818.621.289,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan Nilai Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 742.759.121,00** yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	723.286.600,00	641.329.121,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109.110.000,00	101.430.000,00
TOTAL		832.396.600,00	742.759.121,00

B. BELANJA MODAL

TAHUN 2022		TAHUN 2021
ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
234.882.500,00	233.847.836,00	597.378.000

Belanja Modal pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel direncanakan sebesar **Rp. 234.882.500,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 233.847.836,00** atau **99,56%**, terdapat Sisa Anggaran sebesar **Rp. 1.034.664,00**. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Modal alat Kantor Lainnya	23.250.000,00	23.045.000,00	205.000,00	99,12%
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	9.855.000,00	145.000,00	98,55%
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00%
4	Belanja Modal Personal Computer	106.840.000,00	106.821.190,00	18.810,00	99,98%
5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.192.500,00	16.789.000,00	403.500,00	97,65%
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.737.646,00	262.354,00	99,48%
JUMLAH		234.882.500,00	233.847.836,00	1.034.664,00	99,56%

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TAHUN 2022	TAHUN 2021
184.110.190,00	443.734.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan Nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 184.110.190,00** yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.250.000,00	23.045.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	9.855.000,00
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	27.600.000,00	27.600.000,00
4	Belanja Modal Personal Computer	106.840.000,00	106.821.190,00
5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.192.500,00	16.789.000,00
TOTAL		184.882.500,00	184.110.190,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TAHUN 2022	TAHUN 2021
49.737.646,00	59.000.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan Nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 49.737.646,00** yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.737.646,00
TOTAL		50.000.000,00	49.737.646,00

C. BELANJA TIDAK TERDUGA

Pada Tahun 2022 terdapat Belanja Tidak Terduga pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebesar **Rp. 10.000.000,00** tetapi belum terealisasi sampai di akhir tahun 2022 karena tidak terjadi kerugian atas kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur. Belanja ini digunakan untuk Pelayanan Warga Negara yang memperoleh Kerugian Materil dan Non Materil pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

3.1.3 PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2022		TAHUN 2021
ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
23.400.000,00	23.477.500,00	-

Pada Tahun 2022 terdapat Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) berupa Sewa Asrama Pegawai yang terletak di Jalan Bontomanai dan Jalan Bontonampo Kota Makassar. Sampai akhir Tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar **Rp. 23.477.500,00** lebih besar dari Target Pendapatan sebesar **Rp. 23.400.000,00** disebabkan adanya Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar **Rp. 77.500,00**.

3.1.4 BEBAN

TAHUN 2022	TAHUN 2021
44.005.597.158,07	44.389.873.922,92

Beban – LO Pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 44.005.597.158,07** dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar **Rp. 44.389.873.922,92** mengalami penurunan sebesar **Rp. 384.276.764,85 (0,87 %)**. Rincian informasi tentang Pos Beban – LO terdiri dari:

A. BEBAN OPERASI

TAHUN 2022	TAHUN 2021
42.398.627.888,00	43.131.752.984,00

Beban Operasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 42.398.627.888,00**. Beban Operasi terdiri dari:

NO	JENIS BEBAN OPERASI	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Beban Pegawai	20.096.904.093,00	20.367.721.489,00
2	Beban Persediaan	2.285.665.488,00	2.247.656.182,00
3	Beban Jasa	19.247.409.186,00	19.660.753.367,00
4	Beban Pemeliharaan	25.890.000,00	37.000.657,00
5	Beban Perjalanan Dinas	742.759.121,00	818.621.289,00
JUMLAH		42.398.627.888,00	43.131.752.984,00

1. Beban Pegawai

TAHUN 2022	TAHUN 2021
20.096.904.093,00	20.367.721.489,00

Beban Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 20.096.904.093,00** yang terdiri dari :

URAIAN	TAHUN 2022
Beban Gaji dan Tunjangan	9.619.967.254,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	10.476.936.839,00
JUMLAH	20.096.904.093,00

2. Beban Persediaan

TAHUN 2022	TAHUN 2021
2.285.665.488,00	2.247.656.182,00

Beban Persediaan merupakan nilai beban persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.285.665.448,00** yang terdiri dari:

NO	JENIS BEBAN PERSEDIAAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	227.342.418,00	244.974.750,00
2	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.441.400,00	6.656.500,00
3	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	108.138.880,00	65.768.682,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	89.487.400,00	117.534.150,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	63.927.400,00	91.020.100,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Beban Pos	3.600.000,00	2.825.000,00
7	Beban Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.012.500,00	2.242.000,00
	Beban Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Komputer	2.045.000,00	846.186.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.242.000,00	17.920.000,00
8	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	27.600.000,00	27.600.000,00
9	Beban Makanan dan Minuman Rapat	376.940.000,00	749.952.000,00
10	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.304.000,00	39.312.000,00
11	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.253.520.000,00	26.850.000,00
12	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	34.990.000,00
13	Beban Pakaian Kerja Bengkel	-	1.425.000,00
14	Beban Pakaian KORPRI	112.064.490,00	-
JUMLAH		2.285.665.488,00	2.275.256.182,00

3. Beban Jasa

TAHUN 2022	TAHUN 2021
19.247.409.186,00	19.660.753.367,00

Beban Jasa merupakan Nilai Beban Jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 19.247.409.186,00** yang terdiri dari:

NO	JENIS BEBAN JASA	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	46.700.000,00	121.300.000,00
2	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.830.213.632,00	18.821.317.838,00
3	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.000.000,00	67.700.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	104.473.908,00	75.981.024,00
5	Beban Jasa Tenaga Keamanan	360.000.000,00	345.000.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Supir	56.985.768,00	75.981.024,00
7	Beban Tagihan Telepon	426.710,00	408.840,00
8	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.170.000,00	16.190.000,00
9	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.775.204,00	10.524.000,00
10	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	24.766.700,00	26.430.641,00
11	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	628.412.864,00	
12	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	27.326.400,00	-
13	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	34.158.000,00	-
14	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	99.920.000,00
TOTAL		19.247.409.186,00	19.560.833.367,00

4. Beban Pemeliharaan

TAHUN 2022	TAHUN 2021
25.890.000,00	37.000.657,00

Beban Pemeliharaan merupakan Nilai Beban Pemeliharaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 25.890.000,00** yang terdiri dari:

NO	JENIS BEBAN PEMELIHARAAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.850.000,00	28.540.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	1.825.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.670.000,00	-
4	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.370.000,00	5.965.657,00
5	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	670.000,00
TOTAL		25.890.000,00	37.000.657,00

5. Beban Perjalanan Dinas

TAHUN 2022	TAHUN 2021
742.759.121,00	818.621.289,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 742.759.121,00** yang terdiri dari :

NO	JENIS BEBAN PERJALANAN DINAS	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	641.329.121,00	802.931.289,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	101.430.000,00	15.690.000,00
TOTAL		742.759.121,00	818.621.289,00

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

TAHUN 2022	TAHUN 2021
1.606.969.270,07	1.258.120.938,92

Beban Penyusutan merupakan Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.606.969.270,07** yang terdiri dari:

NO	JENIS BEBAN PENYUSUTAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	585.575.940,08	599.713.596,43
2	Beban Penyusutan Mesin Ketik	242.451.355,32	299.396.487,37
3	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	104.459.250,64	108.741.500,47
4	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	9.512.160,17	9.449.374,00
5	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	65.128.893,63	65.882.441,78
6	Beban Penyusutan Radiasi	22.467.244,78	8.420.960,29
7	Beban Penyusutan Rambu Bersuar	10.142.524,44	16.412.200,00
8	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	124.646.089,67	144.150.024,55
9	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi	8.187.375,02	4.366.600,02
10	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan	1.284.058,19	351.579,01
11	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	1.236.175,00	1.236.175,00
12	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	431.878.203,13	-
TOTAL		1.606.969.270,07	1.258.120.938,92

DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Penghapusan Aset – Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Pengujian Kelayakan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 239/IX/Tahun 2020 Tanggal 21 September 2020 yang terdiri dari:

Bangunan Gedung - Kode: 1.3.03.01.01.0019 Bangunan Pengujian Kelaikan (Ex. Bangunan Pengujian Kendaraan Panaikang)	1.065.440.200,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Kode: 1.3.07.02.01.0001 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(757.776.970,48)	
Jumlah		307.663.229,52

Penjelasan atas Realisasi Belanja Operasi LRA dan Belanja Operasi LO

A. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS

Belanja Operasi LRA		10.366.424.603,00
Utang TPP Tahun 2022	916.183.322,00	
Utang TPP Tahun 2021	805.671.086,00	
Jumlah		110.512.236,00
Belanja Operasi LO		10.476.936.839,00

B. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor

Belanja Operasi LRA		89.835.600,00
Persediaan Tahun 2022	1.744.500,00	
Koreksi Persediaan	1.396.300,00	
Jumlah		348.200,00
Belanja Operasi LO		89.487.400,00

C. Belanja Alat/BAhan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos

Belanja Operasi LRA		4.200.000,00
Persediaan Tahun 2022	-	600.000,00
Belanja Operasi LO		3.600.000,00

D. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Belanja Operasi LRA		19.299.180.096,00
Pembayaran Utang Tahun 2021		1.468.966.464,00
Belanja Operasi LO		17.830.213.632,00

E. Belanja Tagihan Telepon

Belanja Operasi LRA		421.423,00
Utang Tahun 2022	39.357,00	
Utang Tahun 2021	34.070,00	
Jumlah		5.287,00
Belanja Operasi LO		426.710,00

3.1.5 ASET

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
13.313.272.757,89	26.579.892.098,44

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Aset Lancar	2.344.500,00	1.396.300,00
2	Aset Tetap	13.274.293.961,02	26.109.983.298,44
3	Aset Lainnya	36.634.296,87	468.512.500,00
JUMLAH		13.313.272.757,89	26.579.892.098,44

A. ASET LANCAR

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
2.344.700,00	1.396.300,00

Aset Lancar meliputi kas dan Setara Kas, Piutang Lainnya dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.344.700,00** dan **Rp. 1.396.300,00** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,00	-
2	Bagian Lancar Ganti Rugi	-	-
3	Piutang Lainnya	-	-
4	Persediaan	2.344.500,00	1.396.300,00
JUMLAH		2.344.700,00	1.396.300,00

1. Kas di Bendahara pengeluaran

Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran per Tanggal 31 Desember 2022 karena adanya kurang setor ke Kas Daerah sebesar **Rp. 200,00**. Setoran Kas yang seharusnya adalah sebesar **Rp. 9.237.120,00**. Sedangkan yang disetor ke Kas Daerah sejumlah **Rp. 9.236.920,00** (No.STS B. IX No. 40426). Pada Tanggal 13 Januari 2023 dilakukan penyetoran kembali sebesar **Rp. 200,00** ke Rekening Kas Daerah (No. STS B. IX No. 00947).

2. Persediaan

Persediaan terdiri dari Persediaan Barang Pakai Habis/Material dan Barang Persediaan Hibah. Persediaan Barang Pakai Habis/Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis/material terdiri atas alat tulis kantor (ATK), barang cetak, dan lain-lain yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.344.500,00** dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 1.396.300,00** dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Persediaan ATK	1.744.500,00	1.396.300,00
2	Persediaan Benda Pos	600.000,00	-
JUMLAH		2.344.500,00	1.396.300,00

B. ASET TETAP

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
13.274.293.961,02	26.109.983.298,44

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp.**

13.274.293.961,02 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 26.109.983.298,44** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah	4.721.250.000,00	16.721.250.000,00
2	Peralatan dan Mesin	12.109.677.959,00	11.178.499.160,00
3	Gedung dan Bangunan	6.237.163.621,00	7.252.866.175,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	257.328.500,00	257.328.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.620.000,00	59.620.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(10.112.396.118,98)	(9.361.230.536,56)
	Jumlah	13.274.293.961,02	26.109.983.298,44

1. Tanah

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
4.721.250.000,00	16.721.250.000,00

Tanah Bangunan (Tanah Rumah Dinas dan Tanah Kantor) merupakan nilai aset tanah bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 4.721.250.000,00** dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 16.721.250.000,00**. Mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 12.000.000.000,00**. Hal ini disebabkan adanya Mutasi Aset Antar OPD berupa Tanah (Kode: 1.3.01.01.01.0004) untuk Bangunan Tempat Kerja (Brigade Siaga Bencana di Jl. Urip Sumoharjo No. 275, Makassar) ke BPBD Prov. SulSel.

Saldo Awal 1 Januari 2022	16.721.250.000,00
Mutasi antar OPD	(12.000.000.000,00)
Jumlah	4.721.250.000,00

2. Peralatan dan Mesin

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
12.109.677.959,00	11.178.499.160,00

Peralatan dan Mesin merupakan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 12.109.677.959,00** dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 11.178.499.160,00** atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 931.178.799,00**. Adapun rinciannya sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2022
1	Alat-Alat Angkutan	6.106.998.509,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.135.038.050,00
3	Alat Studio Komunikasi	803.853.500,00
4	Alat Kedokteran	72.760.000,00
5	Alat Persenjataan / Keamanan	2.178.050.000,00
6	Komputer	666.729.900,00
7	Alat Keselamatan kerja	64.187.000,00
8	Rambu-Rambu	82.061.000,00
JUMLAH		12.109.677.959,00

a. Alat-alat Angkutan

Alat-alat Angkutan merupakan Nilai Alat-Alat Angkutan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 6.106.998.509,00** yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2022	5.332.329.900,00
Mutasi Antar OPD	774.668.609,00
Jumlah	6.106.998.509,00

b. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan Nilai Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022 sebesar **Rp.2.135.038.050,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	2.118.688.050,00
Beban Penyusutan	23.045.000,00
Reklasifikasi Reguler	16.350.000,00
Reklasifikasi	(23.045.000,00)
Jumlah	2.135.038.050,00

c. Alat Studio Komunikasi

Alat-alat Studio dan Komunikasi merupakan Nilai Alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 803.853.500,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	787.303.500,00
Beban Penyusutan	9.855.000,00
Reklasifikasi Reguler	6.695.000,00
Jumlah	803.853.500,00

d. Alat Kedokteran

Alat-alat Kedokteran merupakan Nilai Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 72.760.000,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	72.760.000,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	72.760.000,00

e. Alat Persenjataan / Keamanan

Alat-alat Persenjataan/Keamanan merupakan Nilai Alat-alat Persenjataan/Keamanan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.178.050.000,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	2.178.050.000,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	2.178.050.000,00

f. Alat Kantor dan Rumah Tangga / Komputer

Alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan Nilai Personal Computer per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 666.729.900,00** yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2022	543.119.710,00
Beban Penyusutan	123.610.190,00
Reklasifikasi Reguler	16.789.000,00
Reklasifikasi	(16.789.000,00)
Jumlah	666.729.900,00

g. Alat Keselamatan Kerja / Alat Pendukung Pencarian

Alat Keselamatan Kerja merupakan Nilai Alat Pendukung Pencarian per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 64.187.000,00** yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2022	64.187.000,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	64.187.000,00

h. Rambu–Rambu / Rambu Tidak Bersuar

Rambu – rambu merupakan Nilai Rambu Tidak Bersuar per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 82.061.000,00** yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2022	82.061.000,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	82.061.000,00

3. Gedung dan Bangunan

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
6.237.163.621,00	7.252.866.175,00

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

Gedung dan Bangunan merupakan Nilai Aset Bangunan dan Gedung per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 6.237.163.621,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	7.252.866.175,00
Mutasi Tambah	49.737.646,00
Mutasi Kurang	(1.065.440.200,00)
Jumlah	6.237.163.621,00

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
257.328.500,00	257.328.500,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup seluruh Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap untuk digunakan. Akun ini tidak mencakup Biaya Perolehan Tanah yang ada dibawahnya.

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 257.328.500,00** yang terdiri dari :

NO	URAIAN	TAHUN 2022
1	Jalan dan Jembatan	49.005.000,00
2	Bangunan Irigasi	109.165.000,00
3	Instalasi	49.711.500,00
4	Jaringan Distribusi	49.447.000,00
	Jumlah	257.328.500,00

a. Jalan dan Jembatan / Jalan Khusus

Jalan dan Jembatan merupakan Nilai Jalan Khusus per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 49.005.000,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	49.005.000,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	49.005.000,00

b. Bangunan Irigasi

Bangunan Air (Irigasi) merupakan Nilai Bangunan Pembuang Pengaman Sungai per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 109.165.000,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	109.165.000,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	109.165.000,00

c. Instalasi Listrik dan Telepon

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
49.711.500,00	49.711.500,00

Instalasi/Jaringan Listrik dan Telepon merupakan Nilai Instalasi/Jaringan Listrik dan Telepon per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 49.711.500,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	49.711.500,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	49.711.500,00

d. Jaringan Distribusi

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
49.447.000,00	49.447.000,00

Jaringan Distribusi merupakan Nilai Jaringan Distribusi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 49.447.000,00** yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2022	49.447.000,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	49.447.000,00

5. Aset Tetap Lainnya

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1.650.000,00	1.650.000,00

Aset Tetap Lainnya merupakan Nilai Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yakni sebesar **Rp. 1.650.000,00**. Aset Tetap Lainnya tersebut adalah berupa Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga.

Saldo Awal 1 Januari 2022	1.650.000,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	1.650.000,00

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang dalam proses perolehan dan pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat Akhir Tahun Anggaran.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 59.620.000,00** dan per 31 Desember 2021 adalah sama sebesar **Rp. 59.620.000,00**.

Hal ini berupa Jasa Konsultansi Perencanaan sebagai Reklasifikasi Aset berdasarkan hasil review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 Nomor 700.04/1234/A.1/Itda sebesar **Rp. 59.620.000,00** (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan) sebagai berikut :

- ✓ Jasa Konsultansi Design Gambar Perencanaan Kantor Baru Satpol PP, sebesar Rp 19.873.333,33.
- ✓ Jasa Konsultansi Design Gambar Asrama Satpol PP Jl Bontomanai, sebesar Rp 19.873.333,33.
- ✓ Jasa Konsultansi Design Gambar Asrama Satpol PP Jl Bontonompo, sebesar Rp 19.873.333,33.

7. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Penyusutan Nilai Aset Tetap sebagai Dasar Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 10.112.396.118,98** terdiri dari:

NO	URAIAN	TAHUN 2021
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.149.213.990,54)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(875.889.142,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(86.110.486,44)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.182.500,00)
Jumlah		(10.112.396.118,98)

a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 9.149.213.990,54** yang terdiri dari :

Saldo Awal Per 1 Januari 2022		(Rp 7.775.625.135,52)
Beban Penyusutan	(Rp 1.039.737.369,06)	
Mutasi Antar OPD	(Rp 333.851.485,96)	
Jumlah		(Rp 1.373.588.855,02)
TOTAL		Rp 9.149.213.990,54

Penyesuaian atas Penyusutan Aset berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 9.149.213.990,54** dan terjadi Penyusutan dan Mutasi Antar OPD atas Peralatan sebesar **Rp. 1.373.588.855,02** berdasarkan Laporan Rekapitulasi Penyusutan.

b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan merupakan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 875.889.142,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal Per 1 Januari 2022	(Rp	1.509.020.022,81)	
Beban Penyusutan	(Rp	124.646.089,67)	
			(Rp 1.633.666.112,48)
Penghapusan			(Rp 757.776.970,48)
TOTAL	(Rp	875.889.142,00)	

Penyesuaian atas Penyusutan Aset berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 875.889.142,00** dan terjadi Pengurangan sebesar **Rp. 757.776.970,48** berdasarkan Laporan Rekapitulasi Penyusutan.

c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 86.110.486,44** yang terdiri dari :

Saldo Awal Per 1 Januari 2022	(Rp	75.402.878,23)	
Beban Penyusutan	(Rp	10.707.608,21)	
TOTAL	(Rp	86.110.486,44)	

d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya merupakan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.18.500,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	(1.182.500,00)
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	(1.182.500,00)

C. ASET LAINNYA

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
36.634.296,87	468.512.500,00

Aset lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat di klasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan Aset Tidak Berwujud dan Aset Kerjasama atau Kemitraan yaitu Pemeliharaan Siadinda dan Simgaji dan Software untuk Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Kearsipan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 36.634.296,87,00** dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 468.512.500,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal (Aset Tak Berwujud) Per Tanggal 1 Januari 2022	468.512.500,00
Penyusutan TA 2022	(431.878.203,13)
Jumlah	36.634.296,87

a. Aset Tak Berwujud (Software)

Belanja Pengadaan Program (Software) per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 468.512.500,00** yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	468.512.500,00
Penyusutan TA 2022	-
Jumlah	468.512.500,00

b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Software per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 431.878.203,13.**

Saldo Awal 1 Januari 2022	-
Penyusutan TA 2022	(431.878.203,13)
Jumlah	(431.878.203,13)

3.1.6 KEWAJIBAN

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul akibat antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek

31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
916.222.679,00	2.274.671.620,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 916.222.679,00** dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 2.274.671.620,00** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	916.183.322,00	805.671.086,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	1.468.966.464,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa - Utang Tagihan Telepon	39.357,00	34.070,00
JUMLAH		916.222.679,00	2.274.671.620,00

3.1.7 EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan Pos Neraca Pemerintah yang menampung selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah. Adapun Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 12.397.050.278,89** yang terdiri dari :

Ekuitas	(19.984.562.409,15)
RK PPKD	32.381.612.688,04
Jumlah	12.397.050.278,89

Ekuitas Dan Kewajiban

Nilai Ekuitas dan Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 13.313.272.957,89** yang terdiri dari :

Ekuitas	12.397.050.278,89
Kewajiban	916.222.679,00
Jumlah	13.313.272.957,89

3.2 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BERBASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BERBASIS KAS, UNTUK ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN YANG BERBASIS AKRUAL.

A. PERSEDIAAN

Pada pos Persediaan menggunakan 2 (dua) Pendekatan yaitu Pendekatan Aset dan Pendekatan Beban.

B. KOREKSI PENYUSUTAN ASET TETAP

Terdapat Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap disebabkan perubahan perhitungan penyusutan dimana penyusutan tahun-tahun sebelumnya menggunakan penyusutan per Tahun, dan pada Tahun 2022 menggunakan penyusutan per bulan.

C. AMORTISASI

Tahun 2022 belum melakukan Amortisasi pada Aset Tak Berwujud.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi amanat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 255 yang menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenterman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dan pada pasal 256 menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka untuk memenuhi pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008-2028.

B. Visi dan Misi Organisasi

Pernyataan Visi merupakan cita-cita dan pandangan yang ingin diwujudkan oleh organisasi dalam kurung waktu 5 (lima) Tahun yakni 2019-2024 yaitu bagaimana dan kemana organisasi dibawa agar dapat eksis berkarya, konsisten, inovatif, antisipatif serta proaktif. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena terkini dan masa depan sejalan dengan visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 Provinsi Sulawesi Selatan yakni **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”** untuk mendukung Visi tersebut maka *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Visi sebagai berikut :*

***“Terwujudnya Ketenteraman dalam Melindungi Kehidupan Masyarakat Serta
Supremasi Hukum Melalui Akselerasi Pembangunan Nasional dengan Pendekatan
Kearifan Lokal”***

Terwujudnya Ketenteraman dalam melindungi kehidupan masyarakat adalah gambaran rasa aman dalam mewujudkan berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan terutama ketahanan budaya dan ketahanan ekonomi sehingga melahirkan budaya tertib, tenteram dan damai dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum melalui akselerasi pembangunan nasional, bahwa salah satu sumber daya yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah Supremasi Hukum, ini memberikan arti bahwa seseorang dikatakan beretika, bermoral, bermartabat, beradab, berahlak dan amanah apabila seseorang telah diuji oleh hukum sehingga akselerasi bidang-bidang pembangunan nasional dan daerah secara terintegrasi yang kita laksanakan hendaknya berkeadilan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kearifan Lokal, adalah bahgia yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah sejalan dengan lingkungan strategi yang begitu cepat dan sulit untuk diprediksi, maka salah satu piranti yang utama untuk kita lestarikan adalah kebudayaan lokal (indegenius knoligius) melalui budaya leluhur bangsa kita sebagai landasan pembangunan yang arif dan bijaksana seperti : "**Siri Napacce, Sipatuo Sipatokkong, Reso Temmanginggi namalomo naletei pammase dewata dan Misakada dipatuo pantakada dipomate**".

Semuanya ini memberikan arti dalam memicu pembangunan di Sulawesi Selatan sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap provinsi lain dalam mewujudkan kesejahteraan.

Pernyataan Misi

Untuk mencapai pernyataan Visi tersebut diatas, ditetapkan Misi yang merupakan pernyataan atas Visi yang ingin dicapai dalam organisasi sekaligus menjadi tuntutan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasi. Penetapan Misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Mengacu pada Visi yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan kedalam Misi yang harus dilaksanakan, yang selanjutnya

diimplementasikan kedalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh seluruh jajaran aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Misi sebagai berikut :

- ❖ *Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;*
- ❖ *Mewujudkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;*
- ❖ *Mewujudkan Perlindungan Kehidupan Masyarakat.*

Bahwa penguatan kelembagaan pemerintah yang kuat dan beribawa merupakan suatu keniscayaan, hal ini terutama disebabkan oleh kuatnya tekanan masyarakat untuk memberikan persuasif kontrol sehingga pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang mampu menyediakan pelayanan guna memenuhi hak dasar masyarakat seperti Penegakan Perda dan Pergub serta mewujudkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam upaya-upaya melaksanakan fungsi Perlindungan kehidupan masyarakat.

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Menegakkan supremasi hukum secara konsisten melalui Penegakan Perda dan Pergub untuk menjamin rasa keadilan, kebenaran dan perlindungan HAM;
- 2) Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat yang sadar akan pentingnya rasa aman, tentram dan damai;
- 4) Terwujudnya perlindungan kehidupan masyarakat.

STRATEGI

Sasaran Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan Rencana Kinerja dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu selama lima tahun kedepan.

Sasaran strategi yang ditetapkan adalah :

- ❖ *Mewujudkan Supremasi Hukum;*
- ❖ *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;*
- ❖ *Meningkatnya Ketenteraman dan Kenyamanan Dalam Masyarakat;*
- ❖ *Meningkatnya Perlindungan Kehidupan Masyarakat;*

C. Organisasi dan Kelembagaan

Untuk mencapai visi dan tujuan strategis tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan masih mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mana ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Program.
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
 - a. Seksi Penegakan.

- b. Seksi Pengawasan.
- 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman.
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - b. Seksi Ketertiban Umum.
- 5. Bidang Bimbingan Masyarakat.
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini.
 - b. Seksi Pengembangan Kompetensi.
- 6. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - a. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
 - b. Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat.
- 7. Bidang Pemadam Kebakaran.
 - a. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- 8. Jabatan Fungsional.

D. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh Sumber Daya Aparatur.

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 620 Orang terdiri dari ASN sebanyak 146 orang dan 474 orang Non PNS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23,55% pegawai merupakan pegawai dengan status sebagai ASN, sedangkan sisanya yaitu sebesar 76,45% pegawai merupakan tenaga Non ASN.

Dilihat dari golongannya, komposisi pegawai yang berada di lingkungan kerja organisasi Satpol PP cenderung didominasi oleh kelompok pegawai golongan III. Pegawai Golongan III secara total memiliki persentase sebesar 61,64% atau sebanyak 90 pegawai dari total keseluruhan pegawai Satpol PP. Persentase terbesar kedua yaitu pada golongan II yang memiliki persentase total sebesar 22,60% atau sebanyak 33 pegawai. Selanjutnya yaitu

golongan IV sebesar 15,06% atau sebesar 22 pegawai dan golongan I sebesar 1% atau sebanyak 1 pegawai dari total seluruh pegawai di Satpol PP.

E. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 yaitu;

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

3) Program Penanggulangan Bencana.

Kegiatan :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

4) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kegiatan Tahun Anggaran 2022. Seiring dengan pencapaian Target Kinerja maka diperlukan adanya perencanaan yang mantap melalui koordinasi dan kebijakan yang mengarah pada pencapaian target kinerja tersebut. Selain itu penghargaan dan kesejahteraan pegawai sebagai sumber daya yang paling menentukan perlu lebih ditingkatkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang semakin menantang.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun Anggaran 2022 mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 44.653.050.060,00** dengan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 43.964.272.865,00** atau sebesar **98,46%**. Secara umum Alokasi Anggaran tersebut kemudian dibagi dalam 3 (Tiga) Objek Belanja yakni Belanja Operasi sebesar **Rp. 44.408.167.560,00** dengan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 43.730.425.029,00** atau sebesar **98,47%**, Belanja Modal sebesar **Rp. 234.882.500,00** dengan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 233.847.836,00** atau sebesar **99,56%** dan Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 10.000.000,00** dengan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 0,00** (Tidak Ada Realisasi karena Tidak Terdapat Resiko Akibat Penanganan Gangguan Trantibum). Indikator Kinerja Program/Kegiatan atas 4 Program dan 16 Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2022 yang dicapai rata-rata **99,72%** dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Demikian Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua program kegiatan, baik Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 selama kurun waktu satu tahun anggaran sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Tahun anggaran yang akan datang.

Makassar, 02 Februari 2023

PENGGUNA ANGGARAN

HEIKAL SULAIMAN, S.STP.,MM.

Pangkat : Pembina

NIP. 19830601 200112 1 003